

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Menurut Bikhu Parekh dalam Bakry (2021:5), multikulturalisme adalah tentang keberagaman budaya atau perbedaan budaya yang tertanam. Ini merupakan konsep tentang pengakuan bahwa manusia dalam banyak hal merupakan produk dari latar belakang budaya mereka yang khas. Berbicara tentang multikulturalisme, Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki diversitas kultural yang amat beragam. Keberagaman etnis di Indonesia ada pada taraf yang tinggi dimana jumlah etnis yang berada di Indonesia mencapai 1.300 etnis (dilansir dari laman [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)) dimana sudah pasti tiap-tiap etnis tersebut memiliki ciri khas berdasarkan tradisi lokal dan jejak historis etnis tersebut.

Keberagaman etnis yang dimiliki oleh Indonesia tidak serta merta membuat negara Indonesia kehilangan integrasi nasionalnya sebagai suatu bangsa, namun sebaliknya, kita mengenal semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” yang berarti berbeda-beda namun tetap satu yang menyimbolkan betapa majemuknya masyarakat Indonesia sekaligus sebagai pengakuan bahwa Indonesia menghargai adanya keragaman kebudayaan yang ada di tanah air. Semboyan ini secara eksplisit menyatakan bahwa keberagaman etnis tidak harus menjadikan masyarakat terpecah belah namun tetap hidup beriringan dan saling menghargai perbedaan. Kendati slogan Bhinneka Tunggal Ika secara eksplisit telah

menegaskan komitmen Bangsa Indonesia terhadap penerimaan multikulturalisme sebagai unsur penting dalam usaha persatuan bangsa (Brata, 2016:10).

Berkaitan dengan topik kultural tersebut, muncul suatu wacana yang bisa dikatakan sebuah isu yang kental dengan persaingan kultural, yaitu mengemukakan usulan penggantian nama salah satu Provinsi di Indonesia yakni Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda. Wacana ini muncul ke permukaan setelah adanya Kongres Sunda yang berlangsung pada 12 Oktober 2020 yang bertempat di Perpustakaan Ajip Rosidi, Kota Bandung, yang dimana kongres tersebut digelar oleh tokoh-tokoh Sunda. Tema acara yang berlangsung di Kongres Pemuda tersebut adalah membahas perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda (dikutip dari laman [cnn.indonesia.com](http://cnn.indonesia.com), 14 Oktober 2020). Sebelum berlangsungnya Kongres Sunda, diadakan pula Diskusi yang berjudul “Dialog Aspirasi Pengembalian Nama Provinsi Jawa Barat Menjadi Provinsi Sunda”. Kongres Sunda serta diskusi tersebut dihadiri oleh berbagai tokoh dan pemuda Sunda. Adji Esha Pangestu selaku ketua Perubahan Nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda memaparkan bahwa asal mula munculnya wacana ini berlandaskan usaha untuk mengembalikan *spirit* budaya Sunda yang semakin hari semakin tergerus. Menurutnya, selama ini istilah Sunda hanya diketahui sebagai salah satu suku yang berada di Jawa Barat, padahal apabila dilihat dari jejak historisnya, istilah Sunda sendiri adalah nama suatu wilayah yang secara geografis mencakup Pulau Jawa serta pulau-pulau lainnya. Dia menambahkan bahwa wilayah Sunda diganti namanya menjadi Jawa Barat (*West Java*) pada tahun 1926 oleh Penjajah Belanda dalam rangka untuk kepentingan pemetaan wilayah perkebunan di tanah jajahan Pulau Jawa sehingga

Adji menilai bahwa nama Jawa Barat tidak sesuai dengan basis jati diri budaya masyarakat Sunda yang sudah melekat sejak dahulu kala (dikutip dari laman [surabaya.tribunnews.com](http://surabaya.tribunnews.com), 12 November 2020) . Andri P Kantaprawira sebagai ketua *Steering Comitee* Kongres Sunda memiliki statement yang senada dengan Adji, dia menyebutkan kebudayaan Sunda semakin tergerus sehingga sekarang istilah Sunda hanya dianggap hanya sebagai nama suku saja. Andri menambahkan bahwa para tokoh Sunda sudah menginginkan nama Sunda tertulis dalam nama administrasi sebuah provinsi. Ia menyebut istilah Jawa Barat yang saat digunakan tidak mencerminkan karakter budaya dan merupakan pengerdilan istilah Sunda. Usulan Provinsi Sunda ini bertujuan untuk mengembalikan harkat martabat suku bangsa Sunda. Wacana perubahan nama ini sebenarnya sudah pernah mengemuka sebab nama-nama provinsi di Indonesia merupakan warisan dari zaman penjajahan Belanda sehingga banyak yang merasa tidak ideal (dikutip dari laman [news.detik.com](http://news.detik.com), 12 Oktober 2020).

Adanya wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda tersebut seakan-akan memberikan sebuah persepsi bahwa sedang ada upaya untuk mengembangkan kultur kesundaan di daerah Jawa Barat, karena apabila kita membaca dari *statement-statement* yang dikeluarkan oleh para pihak yang mencetuskan perubahan nama Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda ini, poin yang bisa kita tangkap adalah mereka berupaya untuk memperlebar budaya kesundaan yang ada di Jawa Barat dengan argumentasi bahwa budaya Sunda sudah semakin terlupakan dan menganggap bahwa penggunaan nama Jawa Barat sudah tidak relevan lagi. Namun, isu ini memunculkan stigma bahwa saat ini di Jawa Barat sedang ada persaingan budaya dimana Sunda sedang mengembangkan kultur

kesundaannya di Jawa Barat sedangkan yang menjadi permasalahan adalah, apabila berbicara tentang Jawa Barat, kultur yang ada di provinsi ini tidak melulu soal Sunda saja, namun di Jawa Barat pun ada satu daerah yang memiliki keunikan kulturenya tersendiri yang membedakannya dengan Sunda yaitu daerah Cirebon dengan etnis Cirebonnya. Etnis Cirebon merupakan kelompok etnis yang mayoritasnya berada di Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon, namun etnis Cirebon pun tersebar di daerah lain seperti di Majalengka, Kuningan, serta Indramayu. Di kalangan masyarakat umum, etnis Cirebon sering diasosiasikan dengan etnis Sunda maupun Jawa namun sebenarnya Etnis Cirebon merupakan identitas kultur yang unik sehingga tidak bisa disamakan dengan kultur Sunda maupun Jawa, bahkan etnis Cirebon memiliki kultur bahasanya sendiri yaitu Bahasa Cirebon. Ditambah lagi, identitas kultural etnis Cirebon semakin kuat dengan adanya keberadaan keraton-keraton yang memegang kultur kacirebonan yang sangat kuat dan keraton-keraton tersebut masih eksis hingga saat ini. Oleh karena itu, adanya isu persaingan budaya ini bukannya tidak mungkin akan memiliki dampaknya terhadap budaya kacirebonan yang terancam hilang.

Sehubungan dengan itu, muncul sebuah upaya dari elemen masyarakat Cirebon untuk memisahkan diri dari Provinsi Jawa Barat dan membentuk Provinsi sendiri yaitu Provinsi Cirebon sebagai bentuk Pemekaran daerah. Isu datang melalui suatu organisasi yang mengatasnamakan dirinya P3C (Presidium Pembentukan Provinsi Cirebon). Realitanya, isu pemisahan diri Cirebon dari Provinsi Jawa Barat sebenarnya sudah ada sejak tahun 2009 dimana isu pembentukan Provinsi Cirebon diawali dengan munculnya pendeklarasian Pembentukan Provinsi Cirebon yang diselenggarakan oleh panitia P3C di sebuah

hotel di Kabupaten Cirebon. Acara pendeklarasian tersebut dihadiri oleh sejumlah perwakilan dewan yang menyatakan kesetujuannya atas pembentukan Provinsi Cirebon ini. Banyak upaya yang dilalui oleh P3C selama periode tahun 2009-2019 namun belum membuahkan hasil, dan pada akhirnya isu ini hilang dari permukaan begitu saja (Ramdhani, 2020:3). Namun, isu Provinsi Cirebon ini seakan-akan “bangkit dari kubur” dengan diadakannya sebuah acara yang bertajuk Deklarasi Provinsi Cirebon yang diprakarasi oleh panitia Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Cirebon (KP3C) di Hotel Prima, Kota Cirebon pada tanggal 27 September 2021. Acara pendeklarasian Provinsi Cirebon yang berlangsung secara luring tersebut juga disiarkan secara *online* melalui kanal *Youtube* Provinsi Cirebon Raya. Acara tersebut dihadiri juga oleh tokoh-tokoh masyarakat Cirebon, selain itu turut hadir pula Anggota DPR RI Maman Imanulhaq. KP3C ini bisa dikatakan sebagai kelanjutan dari P3C sehingga pada dasarnya KP3C memiliki visi dan misi yang sama dengan P3C itu sendiri (dikutip dari laman Fajar Cirebon, 21 September 2021). Kembali mencuatnya isu Provinsi Cirebon ini diindikasikan karena mencuatnya isu Provinsi Sunda yang diperkuat dengan argumentasi Muhammad Jazuli sebagai salah satu anggota P3C, dia mengatakan bahwa gagasan Provinsi Sunda masuk akal karena menurutnya itu merupakan hak dari masyarakat Sunda untuk menyampaikan aspirasinya, namun disamping itu Provinsi Jawa Barat harus menghormati hak budaya, suku, serta bahasa yang berada di wilayah lain khususnya seperti Cirebon, maka ketika itu terjadi, Cirebon seharusnya dapat menjadi Provinsi baru yang memisahkan dirinya dengan Provinsi Jawa Barat (dikutip dari laman Portal Majalengka, 17 Oktober 2021). Hal ini dikarenakan apabila identitas kebudayaan Sunda semakin kuat, maka pilihan bagi

masyarakat Cirebon adalah untuk memisahkan diri dari Provinsi Jawa Barat dan membentuk Provinsi sendiri agar mereka dapat lebih leluasa mengembangkan identitas kebudayaannya. Dalam perjalanannya. Presidium Pembentukan Provinsi Cirebon sudah melakukan beberapa tahapan-tahapan dalam proses merealisasikan Provinsi Cirebon dengan melakukan *Lobbying* di tingkat lokal dengan elit-elit pemerintahan Cirebon dan di tingkat nasional dengan DPR RI.

Meskipun wacana Perubahan Nama Provinsi Sunda tersebut cenderung mendapatkan dukungan dari beberapa kalangan, wacana ini rawan untuk membuka kemungkinan terciptanya sebuah problema multikulturalisme yang muncul dari masyarakat yang berada di Jawa Barat dikarenakan kita tidak bisa menampik fakta bahwa istilah Sunda sudah sangat identik dengan identitas keetnisan dan perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda seakan-akan menggeneralisir bahwa seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Jawa Barat memiliki latar belakang etnis Sunda sedangkan pada kenyataannya, tidak semua masyarakat yang berada di Provinsi Jawa Barat berasal dari etnis Sunda seperti masyarakat Cirebon ini, sehingga pada hasilnya isu Provinsi Cirebon kembali muncul ke permukaan. Ditambah lagi isu Pemekaran Daerah tersebut semakin memperkuat asumsi bahwa adanya upaya memisahkan diri Cirebon dari Provinsi Jawa Barat adalah sebagai wujud manifestasi dari elemen masyarakat Cirebon atas adanya isu persaingan budaya tersebut. Adanya isu anti multikulturalisme di Jawa Barat ini seakan-akan menjadi sebuah ironi karena saat ini dimana orang-orang sedang gencar-gencarnya menyuarakan semangat multikulturalisme dimana-mana, sedangkan yang terjadi di Jawa Barat malah sebaliknya dimana topik kultur yang dikembangkan di Jawa Barat malah isu antara

kultur Sunda vs Non-Sunda. Dengan begitu, munculnya upaya elemen masyarakat Cirebon untuk melakukan Pemekaran Daerah Cirebon seakan-akan merupakan respon refleksi kekecewaan dari entitas kultural Cirebon terhadap adanya upaya entitas kultural Sunda yang berusaha untuk mendominasi di Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan pada latar belakang yang peneliti uraikan diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang permasalahan Pemekaran Daerah Cirebon ini karena menurut peneliti, penting untuk melihat persepsi masyarakat Cirebon dalam menyikapi wacana Pemekaran Daerah Cirebon sebagai respon dari isu persaingan budaya yang ada di Jawa Barat ini yang dimana isu persaingan budaya tersebut bertransformasi menjadi upaya pemisahan diri Masyarakat Cirebon dari Provinsi Jawa Barat. Kasus perlu dikaji lebih lanjut dalam rangka untuk mengetahui apa dampak atau efek yang diberikan oleh kasus ini terhadap masyarakat Cirebon itu sendiri dan apa reaksi yang muncul dari masyarakat Cirebon dalam menyikapi isu ini. Dengan melihat kondisi tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penyusun paparkan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah yaitu bagaimana isu antimultikulturalisme dalam wacana Pembentukan Provinsi Cirebon?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui serta mendeskripsikan tentang isu antimultikulturalisme dalam wacana pembentukan Provinsi Cirebon.

#### **D. Pembatasan Masalah**

Pada penelitian ini, penyusun melakukan pembatasan masalah terhadap permasalahan yang ada dan telah dirumuskan agar penelitian ini memiliki arah yang jelas dan terkonsentrasi kepada satu permasalahan yang akan diteliti. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah membahas tentang isu antimultikulturalisme dalam wacana pembentukan Provinsi Cirebon.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian akan menjadi bermakna apabila ada manfaat yang didapat dari penelitian tersebut, dengan begitu adapun manfaat yang diambil dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat bagi peneliti : penelitian ini dapat menjadi tolak ukur bagi penyusun untuk mengetahui seberapa besar pengetahuan serta keahlian peneliti dalam menyajikan suatu karya ilmiah.
2. Manfaat bagi pembaca : Dengan adanya penelitian ini, pembaca dapat meningkatkan khasanah keilmuannya di bidang politik, khususnya yang berkaitan dengan persepsi masyarakat dalam menyikapi suatu permasalahan.